

The Effect of Fiscal Decentralization, Local Government Size, and Audit Opinions on Mandatory Disclosure

By Akwila Sandro Harefa

Abstract

This research is a quantitative research to empirically test the influence of fiscal decentralization, regional government size and audit opinion on the level of mandatory disclosure of regional government financial reports (LKPD). The population in this study is the financial reports of regional governments on the island of Java for the 2018 - 2022 fiscal year which have been audited by the BPK RI using a purposive sampling method totaling 565 samples. Hypothesis testing in the research used multiple linear regression analysis using the STATA version 17 application. In this study, the results showed that fiscal decentralized and audit opinions did not have a significant influence on the level of mandatory disclosure of LKPD, while the size of local government had a significant influence on the level of mandatory disclosure of LKPD.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Regional Government Size, Audit Opinion, and Level of Mandatory Disclosure of LKPD.*

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Mandatory Disclosure

Oleh Akwila Sandro Harefa

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menguji secara empiris pengaruh dari desentralisasi fiskal, ukuran pemerintah daerah dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun anggaran 2018 – 2022 yang telah diaudit oleh BPK RI dengan metode *purposive sampling* berjumlah 565 sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan analisis regresi liar berganda dengan aplikasi STATA versi 17. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa desentralisasi fiskal dan opini audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sedangkan ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, Dan Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD.